



**KUTAI
KARTANEGARA**



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

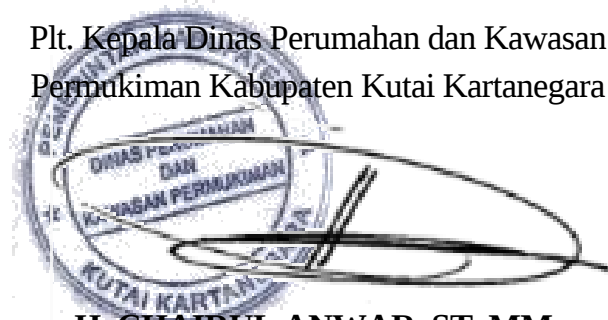
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan izin dan perkenannya sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun langkah strategis dan memfokuskan pada pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam rangka ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”***.

Akhirnya, dengan segala upaya semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, kami berharap agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat diwujudkan terutama dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah dalam rangka mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.

Tenggarong, 16 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

The image shows a circular official stamp of the Kutai Kartanegara District Housing and Settlement Office. The text in the stamp includes 'KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA', 'DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN', and 'KUTAI KARTANEGARA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. CHAIRUL ANWAR, ST.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641001 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16
 Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur	21
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	22
 Bab IV TUJUAN, DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36
 Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 42
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
Bab VIII PENUTUP	63

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan terpilihnya Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka hal ini menjadi titik awal dalam menyusun dokumen perencanaan untuk menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah. Dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, memberikan momentum yang tepat bagi Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan target kinerjanya yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan anggaran pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai yang bersifat indikatif dan mengacu pada perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai pengarah. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih terarah dan terjamin serta tercapainya sasaran strategik

pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Renstra dipandang sebagai:

- Merupakan alat bantu bagi manajemen dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Merupakan gambaran tujuan, strategi serta kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Sebagai alat untuk memacu dan memotivasi aparatur serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada peraturan - peraturan sebagai landasan hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17)
16. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
20. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B.355/BAPP/V.1/065.11/03/202, tanggal 15 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perubahan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai instrumen untuk pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026 dan sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utamayang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35, Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strayegi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam Tabel T-C.26

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari T-C.27.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28

BAB. VIII: PENUTUP

BAB

II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan dan permukiman.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan permukiman.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan dan Permukiman.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan dan Permukiman.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

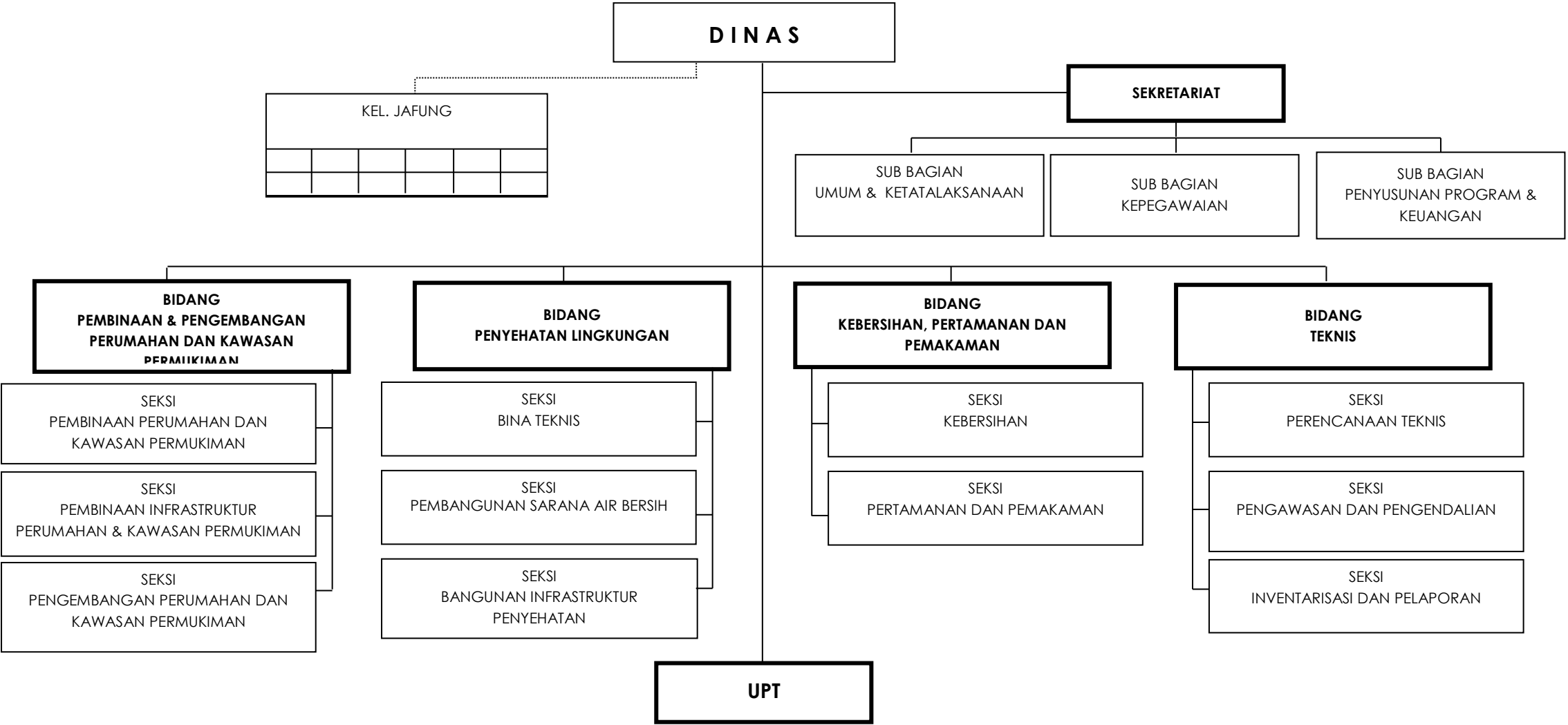
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon IIIa, dan 5 (lima) orang pejabat struktural Eselon IIIb, yaitu:

1. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
2. Bidang Teknik, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Seksi Inventarisasi dan Pelaporan
2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pembinaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Bidang Penyehatan Lingkungan, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Bina Teknik
 - b. Seksi Pembangunan Sarana Air Bersih
 - c. Seksi Bangunan Infrastruktur Penyehatan

5. Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kebersihan
 - b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2.2.Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan sampah dan sistem penyediaan air minum, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu teknik sipil, arsitektur, planologi dan administrasi publik.

Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa bimbingan teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Bimbingan teknis yang dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini menunjukkan masih belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi.

Ruang lingkup tugas dan fungsi DPKP di bidang Penyehatan Lingkungan, dan bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman memerlukan tenaga teknis lapangan yang cukup banyak. Hal ini juga menyebabkan jumlah THL sangat diperlukan untuk menyelenggarakan *core business* DPKP.

Sumber daya yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Jumlah kekuatan pegawai :		
- Pegawai Negeri Sipil	:	219 orang
- Calon Pegawai Negeri Sipil	:	- orang
- Tenaga Harian Lepas (THL)	:	<u>152 orang</u>
Jumlah	:	371 orang

Gambaran komposisi sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan bulan Mei 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

KOMPOSISI ASN DAN THL BERDASARKAN STATUS
KEPEGAWAIAN DAN GENDER

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian PERKIM per Mei 2021

GENDER			
	ASN	THL	JUMLAH
1	2	3	4
PRIA	121	80	201
WANITA	98	72	170
JUMLAH	219	152	371

KOMPOSISI ASN DAN THL BERDASARKAN KOMPETENSI

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian PERKIM per Mei 2021

KOMPETENSI			
	ASN	THL	JUMLAH
1	2	3	4
TEKNIS	39	18	57
NON TEKNIS	180	134	314
JUMLAH	219	152	371

KOMPOSISI ASN THL BERDASARKAN LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian PERKIM per Mei 2021

PENDIDIKAN			
	ASN	THL	JUMLAH
1	2	3	4
S.2	17	-	17
S.1	70	67	137
D.IV	-	1	1
D.III	6	7	13
D.II	1	1	2
SLTA	117	75	192
SLTP	7	-	7
SD	1	1	2
JUMLAH	219	152	371

b. Sarana dan Prasarana

Terkait dengan asset/modal yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terutama meliputi saran dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dimaksud terdiri dari :

1. Kendaraan roda 4 dan 6 sebanyak 40 Unit dengan rincian 22 Dump Truck, 5 Toyota Rush, 5 Pick Up, 3 Mobil Tinja, 2 Tractor, 3 Truck Mountain Crane;
2. Kendaraan roda 2 dan 3 sebanyak 77 Unit dengan rincian 40 Honda Vario Techno, 29 Honda New Revo, 8 Viar;
3. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 21 Unit Note Book, 12 Unit Laptop, 151 Unit PC, 14 Unit Scanner, 105 Printer, 9 Unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 20 Mesin Penghancur Kertas, 19 Unit Pendingin Ruangan (AC).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan Kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Dilihat dari Perkembangan anggaran di awal tahun terbentuknya Nomenklatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsi serta untuk pembiayaan program prioritas yang diamanahkan, pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2017 cukup besar. Kapasitas fiskal serta program prioritas daerah sangat menentukan besaran pagu yang dialokasikan kepada OPD. Untuk itu diperlukan anggaran yang baku dalam mendukung pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien untuk merealisasikan indikator kinerja yang ditetapkan.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel T-C.23**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100	100	100	100		100	100	100	97		100	100	100	97	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			63,85	63,85	65,70	68		63,85	63,85	65,70	68		100	100	100	100	
3	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN			1,61	1,24	1,28	0,87		1,61	1,24	1,28	0,87		100	100	100	100	
4	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP			82,4	83,44	84,40	85		82,43	83,44	84,40	85,30		100	100	100	100	
5	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset			100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
7	Cakupan data yang tersedia			-	-	-	30		-	-	-	30		-	-	-	100	
8	Cakupan rumah tidak layak huni yang direnovasi			47,9	64,61	85,88	88,72		47,9	64,61	85,88	88,72		100	100	100	100	
9	Cakupan Rumah Layak Huni			90,18	90,91	92,12	92,78		90,18	90,91	92,12	92,78		100	100	100	100	
	Rasio Rumah Layak Huni			n.a	n.a	n.a	0,25		n.a	n.a	n.a	0,25		n.a	n.a	n.a	100	
	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU			n.a	n.a	n.a	25,00		n.a	n.a	n.a	25,00		n.a	n.a	n.a	100	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
10	Rumah Tangga Bersanitasi			81,98	86,49	87,51	89,20		81,98	86,49	87,51	89,20		100	100	100	100	
11	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh			0	0	0	0,006		0	0	0	0,006		100	100	100	100	
12	Cakupan Jalan Lingkungan dan Jembatan dalam Kondisi Baik			39,39	39,44	44,32	-		39,39	39,44	44,32	-		100	100	100	-	
13	Cakupan Drainase /Gorong-Gorong dalam Kondisi Baik			35	35	38,92	-		35	35	38,92	-		100	100	100	-	
14	Cakupan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik			0,75	0,75	3,93	-		0,75	0,75	3,93	-		100	100	100	-	
15	Persentase Jalan yang dipelihara			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
16	Persentase penduduk berakses air minum			80,08	84,88	87,38	89,88		80,08	84,88	87,38	89,88		100	100	100	100	
17	Rumah Tinggal Bersanitasi			-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
18	Persentase Pengelolaan Sampah			57,43	32,12	89,20	91,35		57,43	32,12	89,20	91,35		100	100	100	100	
19	Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau			3,24	3,24	3,24	3,35		3,24	3,24	3,24	3,35		100	100	100	100	
20	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk			56,79	-	-	-		56,79	-	-	-		100	-	-	-	

Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Daya serap anggaran terhadap realisasi harus seimbang jangan sampai ada besar pasak daripada tiang. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tabel T-C.24**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27918283	28827454	28784560	31928917		26499210	26397049	26927605	27496878		94,92	91,57	93,55	86,12		3,41	0,93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2200880	2100000	4388664	4513971		1217923	1992690	3761172	4271855		55,34	94,89	85,70	94,64		19,67	36,85
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	300000	72544		-	-	269374	71979		-	-	89,79	99,22		-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100000	200000	400000		-	68419	110567	234645		-	68,42	55,28	58,66		-	-
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38674223	9355921	940580	6257802		29000794	8834331	509289	5588716		74,99	94,43	54,15	89,31		-36,58	-33,74
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6360000	985000	13572666	9557516		161923	574683	7897375	6800084		2,55	58,34	58,19	71,15		10,72	154,57
Program Pengembangan Perumahan	2160801	-	1925000	63445882		287562	-	1397884	37160219		13,31	-	72,62	58,57		132,78	237,16
Program Lingkungan Sehat Perumahan	11844580	1430000	2251289	1267228		4638584	1048400	1834867	618505		29,29	73,31	81,50	48,81		-42,81	-39,57
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	-	-	1764836	-		-	-	1713359	-		-	-	97,08	-		-	-
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	-	328812	-		-	-	311547	-		-	-	94,75	-		-	-
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	269867	-		-	-	241136	-		-	-	89,35	-		-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Bedah Rumah	-	-	1250000	2000000		-	-	1226706	1961093		-	-	98,14	98,05		-	-
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	125000	-	-	-		6720	-	-	-		5,38	-	-	-		-100,00	-100,00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	865000	200000	1601859	3200000		422539	181332	1479272	2783325		48,85	90,67	92,35	86,98		38,69	60,20
Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6082000	20906210	113230089	154895487		2001535	19841944	102349244	120887442		32,91	94,91	90,39	93,20		124,65	178,78
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	6049979	1100000	15390768	750000		1719285	280240	13489140	700719		28,42	25,48	87,64	93,43		-40,66	-20,10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Kukar Idaman sebagai *grand strategy* pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Daerah yang handal, 16 profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui **Kukar Idaman**, penataan pembangunan di segala bidang menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengarusutamaan gender.

Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2021-2026 antara lain :

- a. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- b. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program.
- c. Permasalahan infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Sumber data yang belum akurat terkait jumlah rumah yang sudah atau pun belum terfasilitasi PSU.
- e. Adanya bencana alam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana curah hujan selalu menimbulkan longsornya tebing yang mengakibatkan rusaknya rumah penduduk dan akses jalan.
- f. Kurangnya peningkatan kualitas manajemen organisasi melalui kapasitas sumber daya aparatur dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan 16actor16 terhadap aspek tersebut, 16faktor-faktor dominan yang dirasakan menjadi tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

Peluang

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
 - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Jangkauan wilayah kerja yang luas mencakup seluruh kecamatan dan desa;
3. Banyaknya Program Nasional yang mendukung Program Pembangunan di Kota/Kabupaten;
4. Makin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program Perumahan dan Permukiman;

5. Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

BAB

III

**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU
STRATEGIS DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Pelayanan Infrastruktur dasar masih rendah dan belum merata	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal	Belum optimalnya pendataan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya BNBA
	Penanganan Kumuh Belum Optimal	Belum Optimalnya Penataan Wilayah permukiman
	Penyediaan rumah layak huni belum optimal	Tidak tertatanya wilayah dan besarnya angka kemiskinan berdampak besarnya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2021-2026) dapat dirumuskan sebagai berikut : **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 5 (lima) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam **Misi** Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. **Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;**
2. **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;**
3. **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;**
4. **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar wilayah;**
5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.**

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara lebih fokus pada Misi Kabupaten Kutai Kartanegara poin 4 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah”**. Sementara itu, Misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain Visi dan Misi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih merumuskan filosofi pembangunan Kukar Tahun 2021-2024 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Sehingga dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan akan melaksanakan Program Dedikasi dengan sub kegiatan strategis dan prioritasnya berupa :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat;
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan.

Tabel 5. Pelayanan Dinas Perkim terhadap pencapaian Misi dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara

Misi dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Misi-4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Belum optimalnya Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	➤ Melakukan kerjasama dengan PDAM terdekat dalam pemenuhan air curah untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air minum yang aman. Khususnya di wilayah Delta Mahakam Kab. Kutai Kartanegara.
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih	Belum Optimalnya Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Perlu adanya kajian teknis dalam menangani air limbah serta melakukan penambahan unit armada pelayanan dan unit pengolahan
	Belum optimalnya pelayanan dasar yang dilaksanakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten
	Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan.	Adanya program nasional : percepatan pembangunan infrastruktur wilayah di bidang perumahan rakyat serta percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal.

3.3. **Telaahan Renstra K/L dan Renstra dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: Kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energy; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan *goals* tersebut setidaknya ada 3 (tiga) sasaran strategis yang terkait erat dengan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diwujudkan oleh Kementerian PUPR, yaitu: Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; dan Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak 2. Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana.
		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani.
		1. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
		2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN.
		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik.
		1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
		2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit).
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam mensinergikan rencana pembangunan daerah serta target pembangunan nasional, menetapkan beberapa indikator kinerja bidang cipta karya, yaitu: Jumlah Rumah Layak Huni, Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, Cakupan Layanan Rumah layak huni, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum, Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, dan Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terkait dengan rencana tata ruang wilayah, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2032, namun sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara (IKN), maka Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam Delinasi Wilayah Rencana IKN tersebut sehingga perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan hal ini sesuai dengan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTRW Kabupaten bisa ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Dengan adanya hal tersebut, maka telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dilakukan mengingat saat dokumen rencana strategis ini dibuat, proses revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara juga sedang berjalan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (interdependency), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (equilibrium) yaitu keselarasan proposional antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

KLHS RPJMD yang disusun difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam pilar social, ekonomi, lingkungan hidup,serta hokum dan tata kelola.

Identifikasi isu strategis pada KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara didasari oleh penilaian terhadap kondisi sebagai berikut :

- 1. Berpotensi menimbulkan lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang relevan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama kemacetan, persampahan, konversi lahan, gentrifikasi, PKL, dan nilai hidup dan budaya
- 2. Mempunyai relevansi untuk dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun untuk meminimalisir dampak kumulatif yang lebih luas
- 3. Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak (pemangku kepentingan)

Selaras dengan prinsip KLHS dan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki fungsi merumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perumahan dan Permukiman, perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan yang direncanakan.

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Sosial
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Sosial
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Sosial
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Sosial
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Sosial
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	Lingkungan
7	Menjamin akses energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Ekonomi
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Ekonomi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Ekonomi
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Ekonomi
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Lingkungan
12	Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Lingkungan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Lingkungan
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Lingkungan
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Lingkungan
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	Hukum dan Tata Kelola
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Ekonomi

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJMD Kutai Kartanegara yang telah diinventarisasi setiap permasalahan yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan Renstra K/L dan Renstra dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

a. Wabah Virus COVID-19 yang melanda dunia

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Desease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat meskipun tingkat kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi se Kalimantan Timur. Salah satunya disebabkan karena adanya perlambatan kinerja pada sektor konstruksi yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat

meningkat, iklim investasi tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

b. Penguatan Kesiapan Pembangunan Ibukota Negara (IKN)

Pada saat ini proses pembangunan Ibukota Negara (IKN) masih dilakukan. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu lokasi yang berdekatan dengan IKN. Dengan ini Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung percepatan dalam pembangunan IKN. Dengan penguatan kesiapan pembangunan IKN yaitu segera meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk-produk unggulan daerah, meningkatkan investasi kerjasama antar daerah dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Infrastruktur Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal memuat jenis SPM Pekerjaan Umum

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintah lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan pengampluh SPM terkait seperti :

A. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Pekerjaan Umum meliputi;
 - a. Pemenuhan kebutuhan dan Penataan Ruang meliputi;
 - b. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

2. Target Pencapaian SPM oleh daerah:
 Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah 100 persen (%):

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2020-2021
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Jumlah warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	2020-2021

3. Realisasi Tahun 2020
 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4): (3)x100%
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	729.382	461.861	63,32
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Jumlah warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestic	224.285	153.167	68,29

4. Target Realisasi Tahun 2021
- Target Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4): (3)x100%
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	746.403	564.746	75,66
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	223.300	155.106	69,46

5. Alokasi Anggaran
- Anggaran dialokasikan dalam rangka penerpan dan pencapaian SPM adalah Anggaran APBD Kabupaten :
- Tahun 2020 Rp. 154.895.486.649
 - Tahun 2021 Rp. 129.337.389.910

1. PROGRAM DAN KEGIATAN
- A. Bidang Pekerjaan Umum
- Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Pendampingan DAK Air Minum 2. Perluasan Jaringan Perpipaan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) 5. Pendampingan DAK Sanitasi 6. Pembuatan Prasarana Sanitasi 7. Fasilitasi/Pendampingan Bidang Penyehatan Lingkungan 8. Pembangunan/Peningkatan SPAM Perkotaan dan Perdesaan 9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase 10. Pendampingan Kegiatan Pamsimas Region III 11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan dan Perluasan SPAM Perkotaan dan Perdesaan 12. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

B. Bidang Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan
1	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 8. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 9. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2	Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 4. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

BIDANG : SPM PEKERJAAN UMUM

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2020			Target Realisasi Tahun 2021			Ket
		Jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4):(3)x 100%	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4):(3)x 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	729.382	461.861	63,32	746.403	564.746	75,66	
2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	224.285	153.167	68,29	223.300	155.106	69,46	

B. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi;
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Target Pencapaian SPM oleh daerah:

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 100 persen (%):

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2020-2021
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	2020-2021

3. Realisasi Tahun 2020
- Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4): (3)x100%
1	2	3	4	5
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	> 43 + 214 > 257 (sumber data: pendataan pasca bencana oleh BPBD + pendataan pra bencana oleh Perkim untuk Kecamatan	2	0,778

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4): (3)x100%
1	2	3	4	5
		Loa Kulu)		
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	> 10+123 > 133 (sumber data: pendataan pra bencana oleh Perkim untuk Kecamatan Loa Kulu)	0	0

Jumlah orang yang berhak mendapat layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, diperoleh dari pendataan pra bencana oleh DPKP (Perkim) untuk Kecamatan Loa Kulu pada APBDP 2020 serta diperoleh dari pendataan pasca bencana oleh BPBD pada tahun 2020. Hasil dari pendataan pra bencana oleh Perkim diperoleh data KK yang berhak mendapat layanan SPM korban bencana sebagai berikut: 7 KK di Desa Jongkang, 13 KK di Desa Loa Kulu Kota, 23 KK di Desa Rempanga. Jumlah orang yang berhak mendapat layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, diperoleh dari pendataan pasca bencana oleh BPBD pada tahun 2020 sebagai berikut: 94 KK di Desa Pedohon, 44 KK di Kecamatan Muara Kaman, 75 KK di Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut, dan 1 KK di Kecamatan Loa Kulu.

Jumlah orang yang berhak mendapat layanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten, diperoleh dari pendataan pra bencana oleh DPKP (Perkim) untuk Kecamatan Loa Kulu pada APBDP 2020 serta diperoleh dari pendataan pasca bencana oleh BPBD tahun 2020. Hasil dari pendataan penunjang SPM pra bencana oleh Perkim diperoleh data KK prioritas penerima layanan relokasi program pemerintah sebagai berikut: 3 KK di Desa Loa Kulu Kota, 5 KK di Desa Rempanga, dan 2 KK di Desa Jongkang dengan prakiraan upaya penanganan berupa penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan melalui fasilitasi ganti kerugian asset properti. Prakiraan anggaran biaya sebesar Rp. 786.900.000,00. Sedangkan jumlah orang yang berhak mendapat layanan penyediaan

rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten, diperoleh dari pendataan pasca bencana oleh BPBD adalah 123 KK di Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu.

4. Target Realisasi Tahun 2021
- Target Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4): (3)x100%
1	2	3	4	5
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	> 255	8	3,137
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-	0

Jumlah orang yang berhak mendapat layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, diperoleh dari pendataan pasca bencana oleh BPBD pada tahun 2020. Hasil dari pendataan pasca bencana yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01/590/PL/DPPR/VII/2020 tentang penetapan lokasi untuk lahan relokasi Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang sejumlah 94 unit, dilaksanakan pada APBDP 2020 sebanyak 2 unit, dan pada APBD 2021

dilaksanakan sebanyak 8 unit. Sampai dengan 2021 sudah direalisasi 10 unit, Kekurangan 84 unit disebabkan oleh kekurangan Anggaran sebesar Rp.27.213.218.158.

5. Alokasi Anggaran

Anggaran dialokasikan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah Anggaran APBD Kabupaten :

- Tahun 2020 Rp. 500.000.000,-
- Tahun 2021 Rp. 2.286.781.842,-

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kontribusi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Beberapa tantangan dalam penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah antara lain:

1. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
2. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
3. Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh).
4. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.
5. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.

Arah kebijakan dan strategi di bidang perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, antara lain:

- Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
- Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui: i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); serta iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan.
- Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak.

Sementara itu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah :

1. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (supply side), peningkatan efisiensi layanan air minum (demand side), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enablingenvironment);
2. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;
3. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional;
4. Penciptaan lingkungan yang mendukung;
5. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak air (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar;

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kawasan permukiman, pemerintah menyusun arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi

- Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun
- Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

Kebijakan nasional tersebut tidak akan berhasil diwujudkan tanpa dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh OPD terkait maupun Pemerintah Daerah harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

BAB

IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

4.1. TUJUAN

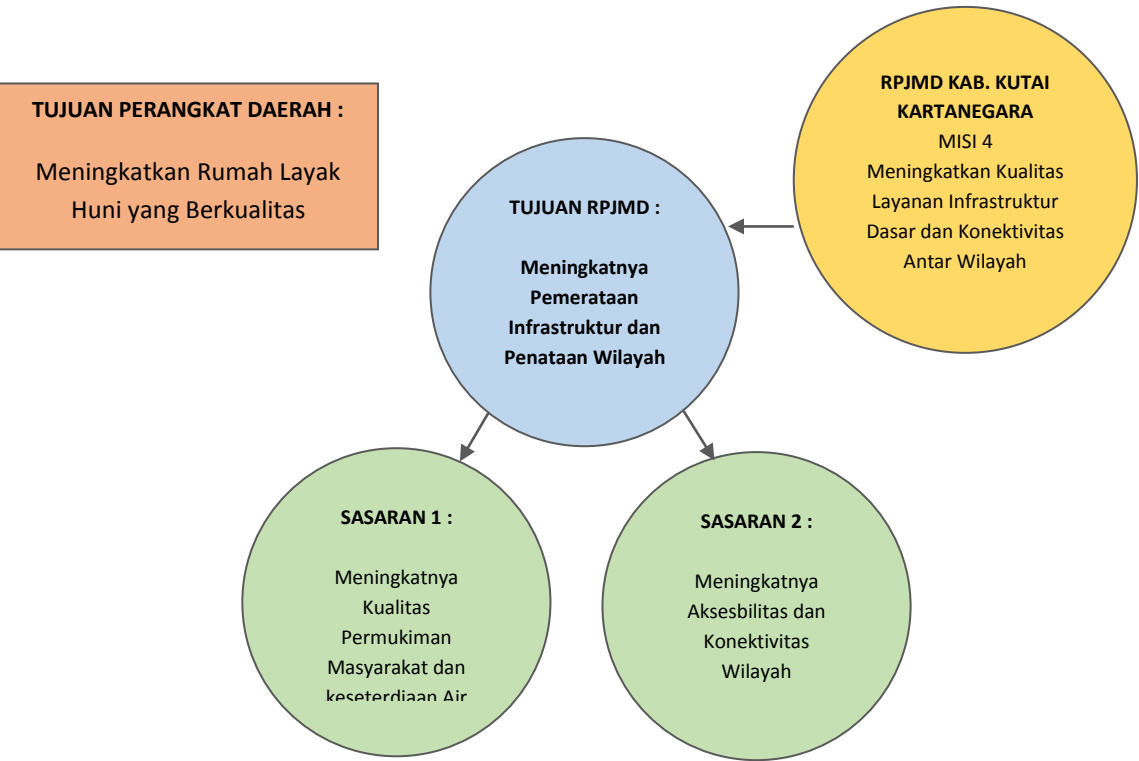
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam dalam renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sesuai dengan Misi ke-4 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yaitu [“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah”](#) yang kemudian diturunkan dalam tujuan Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah, dengan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih dengan indikator sasaran Cakupan layanan air bersih dan Presentase Rumah Layak Huni.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah dengan indikator sasaran Indeks Aksesibilitas Wilayah.

Maka pada pencapaian Misi 4 (empat) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas** dengan indikator kinerja **Rasio Rumah Layak Huni**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana tercantum dalam RPJMD maka dilakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut :



4.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat**”

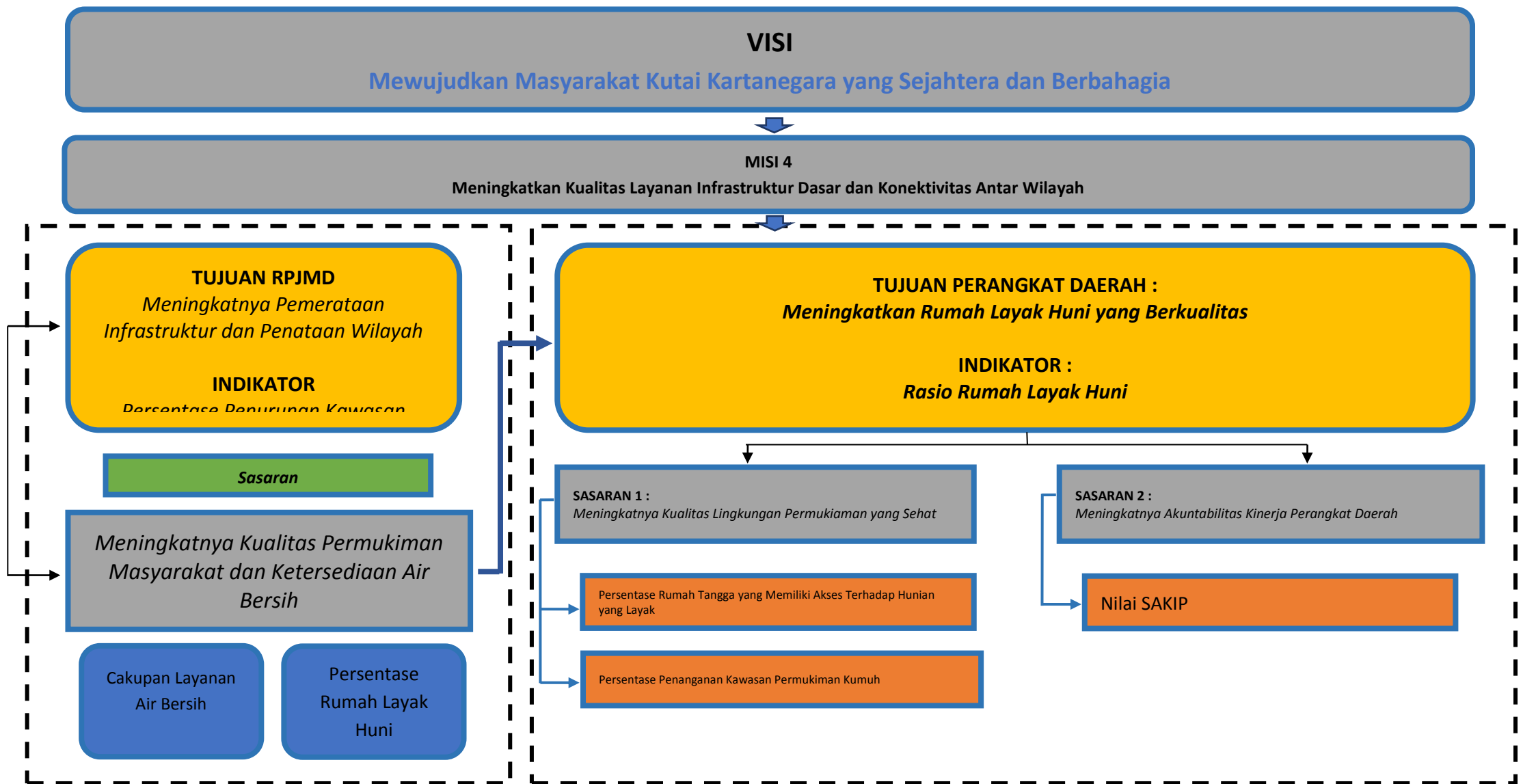
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tabel T-C.25

NO	Misi	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Proyeksi 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Keterangan
									2022	2023	2024	2025	2026	
1.	(Misi 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas			Rasio Rumah Layak Huni	rasio	n.a.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Indikator Tujuan
		1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	persen	n.a.	0,36	0,72	1,09	1,45	1,81	2,17	Indikator Kinerja Utama
				2.	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	n.a.	74,22	79,30	82,48	85,45	87,23	92,97	Indikator Kinerja Utama

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandate (core business) yang diemban.

Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai indikator yang mengacu pada Sasaran Strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Keterkaitan secara linieritas Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, dapat dilihat pada bagan berikut :



**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2022-2026**

**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2022-2026**

BAB

V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari hasil analisis terhadap berbagai faktor-faktor penentu keberhasilan diperoleh pilihan strategi dan kebijakan pencapaian visi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan organisasi, penyelenggaraan penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, asset organisasi serta penatalaksanaan sumber daya organisasi secara periodik dan terukur.
2. Penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur sanitasi air limbah di kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur jalan lingkungan serta infrastruktur drainase berikut operasi dan pemeliharaannya guna pengembangan perumahan yang layak huni, produktif, aman dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum daerah bidang kebersihan serta penyediaan infrastruktur persampahan yang representatif.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan infrastruktur publik yang representatif.

Kebijakan umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pendekatan *community based development* (melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat).

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, ditetapkan 8 (delapan) program pembangunan. Keterkaitan antara program dengan Misi Kabupaten terdapat pada **Misi 4** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah**, yang diwujudkan dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
8. Program Pengelolaan Persampahan.

Sementara itu, **Misi I** bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penunjang aktivitas kinerja yang diwujudkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator program, Kegiatan, indikator kegiatan dan target kinerja beserta pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada Lampiran.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel T-C.26

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Pengembangan Perumahan	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				5 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Kawasan Permukiman	1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
			2	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	

BAB

VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD. Oleh karena itu, target pencapaian empat indikator tersebut harus dijabarkan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara (Tabel TC.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas				Rasio Rumah Layak Huni	rasio	0,25	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
	1. Meningkatkan ya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat			1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	persen	0,36	0,72		1,09		1,45		1,81		2,17		2,17			
				2. Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	n.a	79,30		82,48		85,45		87,23		92,97		92,97			
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	70	70,5	54108812,42	71	54108812,42	71,5	54108812,42	72	54108812,42	72,5	54108812,42	72,5	270544062,09		
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	9	225000,00	9	225000,00	9	225000,00	9	225000,00	9	225000,00	45	1125000,00		
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100000,00	5	100000,00	5	100000,00	5	100000,00	5	100000,00	25	500000,00		
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	3	75000,00	3	75000,00	3	75000,00	3	75000,00	3	75000,00	15	375000,00		
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	4	4	20901952,73	4	20901952,73	4	20901952,73	4	20901952,73	4	20901952,73	20	104509763,64		
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang/bulan	2.580	2.508	20451952,73	2.472	20451952,73	2.400	20451952,73	2.400	20451952,73	2.400	20451952,73	12180	102259763,64		
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	kali	14	14	50000,00	14	50000,00	14	50000,00	14	50000,00	14	50000,00	70	250000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
				Pemeriksaan																
		1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	350000,00	12	350000,00	12	350000,00	12	350000,00	12	350000,00	60	1750000,00		
		1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	2	100000,00	2	100000,00	2	100000,00	2	100000,00	2	100000,00	10	500000,00		
		1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	laporan	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	laporan	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan	7	7	1206759,01	7	1206759,01	7	1206759,01	7	1206759,01	7	1206759,01	35	6033795,03		
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	45	45	250000,00	45	250000,00	45	250000,00	45	250000,00	45	250000,00	225	1250000,00		
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Porsi	2500	2500	200000,00	2500	200000,00	2500	200000,00	2500	200000,00	2500	200000,00	12500	1000000,00		
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lembar	151100	151100	200000,00	151100	200000,00	151100	200000,00	151100	200000,00	151100	200000,00	755500	1000000,00		
		1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	eksemplar	6334	6334	75000,00	6334	75000,00	6334	75000,00	6334	75000,00	6334	75000,00	31670	375000,00		
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang/kali	65	65	301759,01	65	301759,01	65	301759,01	65	301759,01	65	301759,01	325	1508795,03		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
		1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	berkas	n.a	250	130000,00	250	130000,00	250	130000,00	250	130000,00	250	130000,00	1250	650000,00		
		1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	sistem	1	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	1	50000,00	5	250000,00		
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	90	-	,00	10	100000,00	10	100000,00	10	100000,00	10	100000,00	40	400000,00		
		1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	90	-	,00	10	100000,00	10	100000,00	10	100000,00	10	100000,00	40	400000,00		
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	29425100,68	12	29425100,68	12	29425100,68	12	29425100,68	12	29425100,68	60	147125503,42		
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	934342,08	12	934342,08	12	934342,08	12	934342,08	12	934342,08	60	4671710,40		
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1.bulan 2. bulan	12	12	28490758,60	12	28490758,60	12	28490758,60	12	28490758,60	12	28490758,60	60	142453793,02		
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit	210	116	2200000,00	118	2100000,00	118	2100000,00	118	2100000,00	118	2100000,00	575	10600000,00		
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	n.a	-	,00	45	500000,00	45	500000,00	45	500000,00	45	500000,00	180	2000000,00		
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	85	85	2000000,00	40	1200000,00	40	1200000,00	40	1200000,00	40	1200000,00	245	6800000,00		
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	122	30	100000,00	30	100000,00	30	100000,00	30	100000,00	30	100000,00	150	500000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	unit	2	-	,00	2	200000,00	2	200000,00	2	200000,00	2	200000,00	2	800000,00		
		1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	unit	1	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	500000,00		
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37681922,80				
				2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	37681922,80						
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	2	15	1350000,00	11	950000,00	11	950000,00	15	1250000,00	15	1250000,00	67	5750000,00		
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan	Dokumen	2	6	400000,00	2	200000,00	2	200000,00	6	400000,00	6	400000,00	22	1600000,00		
		1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial	Dokumen	n.a	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	5	500000,00		
		1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana	Dokumen	n.a	4	250000,00	4	200000,00	4	200000,00	4	250000,00	4	250000,00	20	1150000,00		
		1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan	Dokumen	n.a	1	300000,00	1	250000,00	1	250000,00	1	300000,00	1	300000,00	5	1400000,00		
		1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Verifikasi	Dokumen	n.a	2	150000,00	2	100000,00	2	100000,00	2	100000,00	2	100000,00	10	550000,00		
		1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen	n.a	1	150000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	5	550000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Kegiatan	n.a	-	,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	4	400000,00		
		1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kegiatan	n.a	-	,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00	4	400000,00		
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	Unit	7	35	6186384,56	35	6486384,56	35	6486384,56	19	6186384,56	33	6186384,56	157	31531922,80		
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhab	Unit	n.a	5	200000,00	5	200000,00	5	200000,00	5	200000,00	5	200000,00	25	1000000,00		
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Site Plan /DED bagi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	n.a	2	150000,00	2	150000,00	2	150000,00	2	150000,00	2	150000,00	10	750000,00		
		1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang terbangun	Unit	7	30	5000000,00	30	5300000,00	30	5300000,00	14	5000000,00	28	5000000,00	132	25600000,00		
		1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Paket	1	2	836384,56	2	836384,56	2	836384,56	2	836384,56	2	836384,56	10	4181922,80		
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26,3	31,77	1113615,44	37,25	1113615,44	42,72	1113615,44	48,19	1113615,44	53,67	1113615,44	53,67	5568077,20		
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	n.a	1	500000,00	1	500000,00	1	500000,00	1	500000,00	1	500000,00	5	2500000,00		
		1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Review Bidang PKP	Dokumen	n.a	1	500000,00	1	500000,00	1	500000,00	1	500000,00	1	500000,00	5	2500000,00		
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	Hektar (Ha)	n.a	2	613615,44	2	613615,44	2	613615,44	2	613615,44	2	613615,44	10	3068077,20		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	unit	n.a	20	263615,44	20	263615,44	20	263615,44	20	263615,44	20	263615,44	100	1318077,20		
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area	Hektar (Ha)	n.a	2	350000,00	2	350000,00	2	350000,00	2	350000,00	2	350000,00	10	1750000,00		
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,4	7,2	10340000,00	7	10340000,00	6,7	10340000,00	6,4	10340000,00	6,1	10340000,00	6,1	51700000,00		
				2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25	517		517		517		517		517		2585			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi	unit	25	517	10340000,00	517	10340000,00	517	10340000,00	517	10340000,00	517	10340000,00	2585	51700000,00		
		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki	unit	25	517	10340000,00	517	10340000,00	517	10340000,00	517	10340000,00	517	10340000,00	2585	51700000,00		
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n.a	4,92	1350000,00	4,69	1350000,00	4,48	1350000,00	4,29	1350000,00	4,11	1350000,00	4,11	6750000,00		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	persen	n.a	3,95	1350000,00	7,88	1350000,00	11,81	1350000,00	15,75	1350000,00	19,68	1350000,00	19,68	6750000,00		
		1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	n.a	5	1150000,00	5	1150000,00	5	1150000,00	2	500000,00	2	500000,00	19	4450000,00		
		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	meter	666,9	257	200000,00	257	200000,00	257	200000,00	257	850000,00	257	850000,00	1285	2300000,00		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	persen	87,9	89,32	16635000,00	90,74	24327954,28	92,16	14469079,84	93,58	41267187,76	95	11000000,00	95	107699221,88				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
				2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	persen	n.a	0,54		0,7		1,03		1,26		1,48		1,48			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	paket	6	3	16635000,00	4	24327954,28	4	14469079,84	4	41267187,76	4	11000000,00	19	107699221,88		
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	L/det	1419	0	,00	250	3500000,00	250	1500000,00	250	7000000,00	250	1000000,00	250	13000000,00		
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	L/det	100	0	,00	10	13327954,28	7,5	8469079,84	7,5	20500000,00	7,5	4500000,00	32,5	46797034,13		
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	27	1	1000000,00	3	5500000,00	3	3500000,00	3	10767187,76	3	4000000,00	13	24767187,76		
		1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1) Jumlah tandon 2) Jumlah lahan yang tersedia	Unit Paket	3921	10005	14635000,00	-	,00	-	,00	-	,00	-	,00	10005	14635000,00		
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang Pipa Tersang	1) Unit 2) Meter	1) 466 2) 2000	1) 500	1000000,00	1) 500	2000000,00	1) 500	1000000,00	2) 1500	3000000,00	2) 1500	1500000,00	1) 1500 2) 3000	8500000,00		
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	81,71	83,4	8400000,00	85	6000000,00	86,7	6000000,00	88,3	6000000,00	90	6000000,00	90	32400000,00		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	Unit	n.a	81	8400000,00	51	6000000,00	51	6000000,00	51	6000000,00	51	6000000,00	285	32400000,00		
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	,00	2	300000,00	2	300000,00	2	300000,00	2	300000,00	8	1200000,00		
		1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit Pengolahan Terpusat	Unit	-	-	,00	15	1484947,50	15	1484947,50	15	1484947,50	15	1484947,50	60	5939790,00		
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sapras sanitasi	Unit	81	81	8400000,00	0	,00	0	,00	0	,00	0	,00	81	8400000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	,01	10	,01	12	,01	14	,02	16	,02	18	,02	20	21
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kecamatan / Desa (Kegiatan)	Kegiatan	-	-	,00	1	310651,25	1	310651,25	1	310651,25	1	310651,25	4	1242605,00		
		1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta	Orang	-	-	,00	20	110651,25	20	110651,25	20	110651,25	20	110651,25	80	442605,00		
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kegiatan	-	-	,00	1	1500000,00	1	1500000,00	1	1500000,00	1	1500000,00	4	6000000,00		
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPAL-T Skala Permukiman	Unit	-	-	,00	1	700000,00	1	700000,00	1	700000,00	1	700000,00	4	2800000,00		
		1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	Unit	n.a	-	,00	1	675000,00	1	675000,00	1	675000,00	1	675000,00	4	2700000,00		
		1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Unit	n.a	-	,00	30	168750,00	30	168750,00	30	168750,00	30	168750,00	120	675000,00		
		1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang terbangun/tersedia	Unit				100	750000,00	100	750000,00	100	750000,00	100	750000,00	400	3000000,00		
TOTAL								99483812,42		104776766,70		94917892,26		121716000,17		91448812,42		512343283,97		

BAB

VII

**KINERJA PENYELENGGARAN
BIDANG URUSAN**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2016-2021.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17).

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator program seperti dibawah ini :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel T-C.28

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN :								
	Indikator Tujuan :								
	Rasio Rumah Layak Huni	persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Indikator Sasaran :								
	1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	persen	0,36	0,72	1,09	1,45	1,81	2,17	2,17
	2. Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	n.a	79,30	82,48	85,45	87,23	92,97	92,97
2	INDIKATOR PROGRAM :								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50
	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26,3	31,77	37,25	42,72	48,19	53,67	53,67

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,4	7,2	7	6,7	6,4	6,1	6,1
	Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25,00	517	517	517	517	517	2.585,00
	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n.a	4,92	4,69	4,48	4,29	4,11	4,11
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	persen	87,90	89,32	90,74	92,16	93,58	95,00	95,00
	Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	persen	n.a	0,54	0,7	1,03	1,26	1,48	1,48
	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	81,71	83,4	85	86,7	88,3	90,00	90,00
3	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN :								
	Indikator Kegiatan :								
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	45,00
	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	90,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00
	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	unit	210,00	116,00	118,00	118,00	118,00	118,00	575,00
	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	2,00	15,00	11,00	11,00	15,00	15,00	67,00
	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Kegiatan	n.a	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	Unit	7,00	35,00	35,00	35,00	19,00	33,00	157,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	n.a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Luas Area	Hektar (Ha)	n.a	2	2	2	2	2	10,00
	Jumlah rumah yang direnovasi	unit	25,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	2.585,00
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	persen	n.a	3,95	7,88	11,81	15,75	19,68	19,68
	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	paket	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	19,00
	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	Unit	n.a	81,00	51,00	51,00	51,00	51,00	285,00
	Indikator Sub Kegiatan :								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	orang/bulan	2.580,00	2.508,00	2.472,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.180,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	kali	14	14	14	14	14	14	70,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	60,00
	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Laporan Data Pegawai	laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	225,00
	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Porsi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	lembar	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	755.500,00
	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	eksemplar	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00	31.670,00
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	orang/kali	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	325,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	berkas	n.a	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	sistem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	90,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00
	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1.bulan 2. bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit	n.a	-	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	unit	85,00	85,00	40,00	40,00	40,00	40,00	245,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	122,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	unit	2,00	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan	Dokumen	2,00	6,00	2,00	2,00	6,00	6,00	22,00
	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial	Dokumen	n.a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana	Dokumen	n.a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan	Dokumen	n.a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Dokumen Pendataan Verifikasi	Dokumen	n.a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen	n.a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kegiatan	n.a	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhab	Unit	n.a	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
	Jumlah dokumen Penyusunan Site Plan /DED bagi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	n.a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang terbangun	Unit	7,00	30,00	30,00	30,00	14,00	28,00	132,00
	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Paket	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
	Jumlah Dokumen Review Bidang PKP	Dokumen	n.a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	unit	n.a	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	Luas Area	Hektar (Ha)	n.a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
	Jumlah RTLH yang diperbaiki	unit	25,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	2.585,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	n.a	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	19,00
	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	meter	666,90	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	1.285,00
	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	L/det	1.419,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	L/det	100,00	0	10,00	7,50	7,50	7,50	32,50
	Jumlah Kegiatan	Kegiatan							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
			27,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	13,00
	1) Jumlah tandon 2) Jumlah lahan yang tersedia	Unit Paket	392 1	1000 5	-	-	-	-	1000 5
	1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang Pipa Terpsang	1) Unit 2) Meter	1) 466 2) 2000	1) 500	1) 500	1) 500	2) 1500	2) 1500	1) 1500 2) 3000
	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Jumlah Unit Pengolahan Terpusat	Unit	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
	Jumlah sapras sanitasi	Unit	81,00	81,00	0	0	0	0	81,00
	Jumlah Kecamatan / Desa (Kegiatan)	Kegiatan	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Jumlah Peserta	Orang	-	-	20	20	20	20	80,00
	Jumlah Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kegiatan	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Jumlah SPAL-T Skala Permukiman	Unit	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	Unit	n.a	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Jumlah Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Unit	n.a	-	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang terbangun/tersedia	Unit			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

BAB

VIII

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan acuan perencanaan kinerja tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selanjutnya menjadi alat ukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022-2026. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan penyelarasan terhadap penjabaran Renstra ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target/rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir Renstra tahun 2021.

Tenggarong, 16 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

The image shows a circular official stamp of the Kutai Kartanegara Regency Housing and Settlement Service (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman). The stamp contains the text "KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA" and "DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. CHAIRUL ANWAR, ST.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19641001 199803 1 005